

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hubungan Internasional suatu hubungan kerja sama antar negara adalah sebuah hal yang penting. Negara adalah subjek dalam hukum internasional yang paling penting, oleh hubungan antar negara terciptalah hubungan internasional dengan landasan hukum internasional. Untuk menjalankan hubungan kerja sama, diplomasi digunakan sebagai instrument utamanya. Diplomasi merupakan cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional menggunakan peraturan serta tata krama tertentu (Warsito & Kartikasari, 2007). Saat ini banyak sekali negara melakukan hubungan diplomasi antar negara. Namun juga banyak dilakukan pelanggaran pada hukum internasional yang berlaku.

Brasil atau Republik Federasi Brasil adalah negara terluas pertama di benua Amerika Selatan dan kelima di dunia dengan luas wilayah total mencakup 8.515.770 km² serta populasi mencapai 208.846.892 jiwa (2018). Dengan wilayah tersebut kemudian Brasil dibagi ke dalam 26 negara bagian dan 1 distrik federal dengan masing-masing wilayah di pimpin oleh gubernur. Negara Brasil telah merdeka sejak tahun 1822 pasca di jajah oleh Portugal dengan sistem pemerintahan Republik Presidensial Federal dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Brasil sendiri masih di golongan kedalam negara yang berkembang dengan posisi ke-8 di dunia, meski demikian ekonomi di negara tersebut terbilang cukup baik dengan Pendapatan Domestik 3, 248 Triliun US \$ serta pendapatan perkapita 15.600 US \$. Dengan hasil pertanian seperti kopi, gandum, tebu, beras, jagung, kakau, serta kacang kedelai sebagai produk utama pendobrak ekonomi negara. (Dickson, 2020)

Indonesia dengan Brasil telah menjalin hubungan kerjasama serta diplomatik dimulai pada tahun 1953. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brasil berjalan dengan cukup baik. Kerja sama yang sudah terlaksana sejak lama ini melibatkan sektor perdagangan, investasi, pariwisata serta teknologi dan juga pada sektor ekonomi terkhususnya. Selain dari pada itu kedua negara juga memiliki pandangan yang sama terhadap isu-isu regional yang sedang terjadi seperti penegakan demokrasi serta Hak Asasi Manusia. Kedua negara saling memberikan dukungan satu sama lain dalam mengelola permasalahan masing masing tanpa

ikut campur. Kedua negara, baik Indonesia maupun Brasil sama sama berupaya menjaga hubungan agar tetap terjalin dengan baik.

Dalam upaya untuk terus melanjutkan dan memperkuat hubungan kerjasama, kedua negara melakukan kegiatan berupa kunjungan satu sama lain. Kunjungan ini dilakukan oleh kepala negara, pejabat anggota, pelaku ekonomi serta masyarakat kedua negara. Kunjungan pertama dilakukan oleh Presiden Brasil Fernando Henrique Cardoso pada Januari tahun 2001. Kunjungan selanjutnya juga dilakukan oleh Presiden Brasil Liuz Inácio Lula da Silva pada 12 Juli tahun 2008. Sebagai bentuk respon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan kunjungan ke Brasil pada November 2008. Kegiatan saling mengunjungi ini mendapatkan respon yang positif dari kedua belah negara.

Gambar 1.1 Peta Negara Brasil



Sumber : Maps of World, Political Maps of Brazil (diakses : 03 Maret 2020)

<https://www.mapsofworld.com/brazil/brazil-political-map.html>

Sebagai bentuk kepercayaan Indonesia kepada Brasil telah dikirim pula beberapa Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di beberapa negara bagian Brasil seperti São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte dan Recife. Dan diterima dengan baik pula oleh negara Brasil (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia-DF Republik Federasi Brazil, 2018). Namun pada tahun 2015 kebijakan luar negeri Brasil untuk menerima perwakilan dari Indonesia berubah. Penolakan surat kepercayaan Toto Riyanto sebagai Duta Besar Indonesia untuk Brasil

dilakukan oleh pemerintahan Brasil. Presiden Brasil, Dilma Rousseff melakukan penolakan pada surat kepercayaan Duta Besar Indonesia Toto Riyanto. (Fidel Ali Permana , 2015)

Kebijakan yang dilakukan Brasil terhadap Indonesia ini tentu sangat mengecewakan bagi Indonesia. Melalui Menteri Luar negeri, Ibu Retno Marsudi menyatakan protes keras terhadap perlakuan Brasil terhadap perwakilan Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Brasil ini tidak dapat diterima oleh Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan baik dengan Brasil. Akibatnya Kementerian Luar Negeri Indonesia menarik langsung Toto Riyanto untuk kembali ke Indonesia. Pengambilan keputusan luar negeri Brasil kepada Indonesia ini dibarengi dengan kasus penjatuhan hukuman mati kepada dua warga negara Brasil di Indonesia. Hukuman mati ini diberikan kepada Marco Archer Carsodo (ditangkap pada tahun 2003) dan Rodrigo Muxfeldt Gularte (ditangkap tahun 2004) yang melakukan tindak kejahatan penyelundupan narkoba atau *drug trafficker*. Meski telah ditangkap sejak awal tahun 2004, penjatuhan hukuman mati baru dilakukan pada tahun 2012 dan 2015. Hal ini yang kemudian dirasa sebagai pemicu awal mengapa Brasil mengambil keputusan untuk menolak surat kepercayaan (*credential letter*) dari Indonesia. (Dewi, 2016)

B. Rumusan Masalah

“ Apa saja alasan yang mempengaruhi Brasil menolak Surat Kepercayaan (*Letter Of Credence*) dari Presiden Indonesia ?”

C. Teori

Untuk mengkaji serta meneliti permasalahan pemutusan hubungan diplomatik Brasil dengan Indonesia, maka diperlukan adanya sebuah teori yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam kesempatan ini, penulis akan menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri sebagai sarana untuk menjawab permasalahan pemutusan hubungan diplomatik antara Brasil dengan Indonesia.

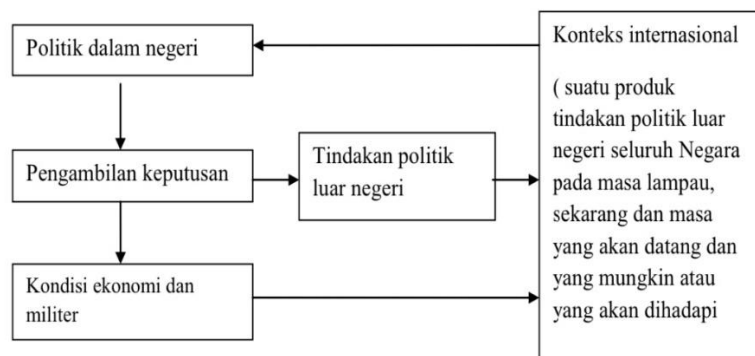
1. Teori Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri merupakan suatu strategi serta aksi yang sudah direncanakan serta dirumuskan oleh para pembuat keputusan suatu negara dengan tujuan mencapai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) dapat dipercaya sebagai sebuah representasi dari kuasa politik nasional dalam suatu negara. (Herningtyas, Surwandono, & Warsito, 2015) Secara umum politik luar negeri

merupakan seperangkat nilai, sikap, arah dan sasaran sebagai upaya mempertahankan, memajukan dan mengamankan semua kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional. (Permana, 2018)

William D. Coplin dalam bukunya mengatakan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri ada tiga pertimbangan yang memberikan pengaruh besar. Ketiga pertimbangan tersebut, antara lain kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Berikut skema teori pengambilan kebijakan luar negeri serta penjelasannya. (Coplin, 2003)

Gambar 1.2 Skema Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: *suatu telaah teoritis*. CV. Sinar Baru, Bandung 1992, hal. 30.

Kondisi Politik Dalam Negeri

Politik yang sedang terjadi di dalam suatu negara akan sangat mempengaruhi politik luar negerinya pula. Kondisi politik suatu negara yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi akan dijadikan pertimbangan oleh negara tersebut untuk merumuskan politik luar negerinya. (Coplin, 2003)

Kemampuan Ekonomi dan Militer

Pengambilan keputusan suatu negara tentu harus berdasarkan kepada bagaimana kondisi perekonomian saat pengambilan keputusannya. Tak hanya pada ekonomi,

pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi militer negerinya. Suatu negara harus mampu serta memiliki ketersediaan dalam hal untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta stabil sebagai penopang politik luar negerinya. Baik dari perspektif ekonomi maupun militernya, selain itu termasuk juga faktor geografis suatu negara. (Coplin, 2003)

Konteks Internasional

Pengambilan keputusan luar negeri juga harus berdasarkan kepada bagaimana konteks internasionalnya. Konteks Internasional sendiri merupakan situasi politik atau situasi lain yang terjadi diluar negara tersebut. Konteks Internasional inilah yang nantinya akan mendorong diambilnya suatu sikap luar negeri oleh negara tersebut . Dinamika politik dalam politik internasional misalnya, akan memaksa suatu negara untuk merubah norma serta corak politik tertentu dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi serta kedaulatan negara masing-masing pada sistem internasional. (Maksum, 2015) Dalam hal ini termasuk juga dukungan dan pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Konteks Internasional juga merupakan suatu kondisi yang harus di hadapi, dicegah dan juga diantisipasi oleh suatu negara. (Coplin, 2003)

William D. Coplin kemudian mengelompokkan kebijakan luar negeri menjadi 3 kelompok berdasarkan cara pengambilan keputusan.

1) Keputusan General

Keputusan ini merupakan fondasi dasar dari kebijakan luar negeri, keputusan yang dibuat akan ditempatkan sebagai *blue-print* dalam proses pengambilan keputusan. Dimana proses pembuatannya harus dilakukan secara dalam serta melibatkan banyak pihak. Aktor-aktor dari proses pembuatan kebijakan luar negeri ini adalah para eksekutif negara seperti Presiden dan Perdana Menteri.

2) Keputusan Administratif

Keputusan administratif menurut William D. Coplin merupakan sebuah keputusan yang bersifat operasional dengan cara yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh negara sebagai aktor internasional. Meskipun keputusan administratif adalah keputusan yang sudah biasa diambil dan digunakan sehari-hari, namun keputusan ini tidak boleh dilakukan dengan sekedarnya. Karena justru keputusan administratif akan menunjukkan apakah

keputusan umum yang bersifat administrative suatu negara itu berjalan dengan efektif atau tidak.

3) Keputusan Krisis

Dalam pengambilan keputusan bersifat krisis ini didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu :

- Keterbatasan data
- Keterbatasan waktu
- Merasa kepentingannya sedang terancam
- Dalam Batasan dimensi tertentu dengan jangka waktu singkat

(Syahitaningrum, 2016)

Dalam pengambilan keputusan luar negeri yang bersifat krisis, suatu negara harus memberikan respon yang cepat terhadap suatu isu internasional, dengan keterlibatan serta data yang minim. Kebijakan luar negeri dalam dimensi krisis dapat dilihat dalam pengambilan keputusan luar negeri yang terkait dengan *war* terhadap negara atau kelompok tertentu yang dianggap akan mengganggu keamanan nasional. (Herningtyas, 2015)

Dalam kasus penolakan surat kepercayaan (*letter of credence*) antara Indonesia dengan Brazil dapat di Analisa dengan teori politik luar negeri menurut William D. Coplin. Brasil dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri kepada Indonesia dalam hal penolakan surat kepercayaan perwakilan Duta Besar Indonesia untuk Brasil di pengaruhi besar dengan kondisi politik dalam negerinya. Brasil setidaknya sampai dengan tahun 2014 masih menganut system pemerintahan presidensil, dimana Presiden sangat mungkin untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Presiden Brasil yang memiliki hak untuk membuat keputusan luar negeri dapat di analisis dengan teori William D. Coplin. Dimana presiden membuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan kelompok keputusan General. Kebijakan luar negeri Brasil dengan menolak surat kepercayaan (*letter of credence*) yang dibawa oleh Toto Riyanto sebagai perwakilan Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil adalah keputusan general. Dimana keputusan yang dibuat oleh Brasil ini di tempatkan sebagai blue-print dalam proses pembuatan keputusannya. Kebijakan ini dibuat dengan proses yang mendalam dengan melibatkan eksetutif tinggi yaitu Presiden Brasil Dilma Rouseff. (Haiga, 2016)

D. Hipotesis

Adanya dorongan dari pemerintah Brasil untuk segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia melalui penolakan surat kepercayaan (*letter of credence*) Toto Riyanto sebagai Duta Besar Republik Indonesia.

E. Tujuan

Untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Brasil dalam hal menolak surat kepercayaan (*letter of credence*) dari Presiden Indonesia.

F. Batasan Penelitian

Dalam meneliti isu ini penulis menggunakan batasan penelitian dari tahun 2004 – 2015. Dimana Pada tahun 2004 dan 2005 2 warga negara Brasil di tangkap di Indonesia karena kasus penyelundupan narkoba. Pada tahun 2015 terjadi peristiwa Brasil menolak surat kepercayaan (*letter of credence*) dari Presiden Indonesia.

G. Metodologi

Penelitian ini menggunakan library research yang berasal dari buku, jurnal dan artikel berita.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori, hipotesis, tujuan, batasan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Menjelaskan tentang Dinamika Hubungan Indonesia dengan Brasil serta keterlibatan Indonesia dalam penjatuhan hukuman mati warga negara Brasil

Bab3 : Menjelaskan tentang Politik Luar Negeri Brasil serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi Brasil menolak surat kepercayaan (*letter of credende*) dari Presiden Indonesia

Bab 4 : Menjelaskan kesimpulan yang merupakan pembahasan paling terakhir sebagai penutup